



Kementerian PPN/
Bappenas

Pusb̄indiklatren

LAPORAN KINERJA (LKJ)

PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2022

PUSAT
PEMBINAAN,
PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN
PERENCANA

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional



Kata Pengantar

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan organisasi pemerintah, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) menyusun dokumen Laporan Kinerja (LKj) secara berkala. Penyusunan LKj mengacu kepada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan penilaian kinerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat, jelas, dan terukur dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah.

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan LKj. Peraturan pertama yang menjadi acuan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala kepada atasannya. Adapun peraturan berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 menyajikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbindiklatren di tahun 2022, analisis perkembangan, kendala dan hambatan, serta usulan peningkatan kinerja Pusbindiklatren pada masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas

Wignyo Adiyoso
NIP 196905072001121001



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pusbindiklatren

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Dalam indikator kinerja persentase Jabatan Fungsional Perencana yang Lulus Uji Kompetensi pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusbindiklatren 2022, target yang ingin dicapai adalah sebesar 70 persen. Berdasarkan realisasi tahun 2022, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut dengan pencapaian kelulusan sebesar 89,59 persen. Persentase kelulusan uji kompetensi tersebut dicapai dari kelulusan peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Terdapat 353 peserta yang lulus dari total 394 peserta yang mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional perencana. Namun, secara keseluruhan Pusbindiklatren telah melakukan uji kompetensi untuk 2.254 orang dengan total sebanyak 1.860 orang melakukan uji kompetensi untuk perpindahan jabatan. Pusbindiklatren akan berupaya untuk meningkatkan fasilitasi pembekalan dengan menambah kuantitas pelaksanaan pembekalan di tahun berikutnya.

2. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Dalam indikator kinerja Persentase Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan pada PK Kepala Pusbindiklatren 2022, target yang ingin dicapai adalah sebanyak 75 persen. Berdasarkan realisasi tahun 2022, Pusbindiklatren telah berhasil melampaui target tersebut dengan persentase karyasiswa yang lulus mencapai 84,66 persen. Upaya yang dilakukan oleh Pusbindiklatren dalam mendukung kelulusan karyasiswa adalah dengan mengadakan pemantauan karyasiswa dan melakukan komunikasi secara aktif dengan program studi mengenai perkembangan karyasiswa.

3. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Dalam indikator kinerja Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusbindiklatren 2022, target yang ingin dicapai adalah sebanyak 92 persen. Pusbindiklatren berhasil meluluskan 1.228 orang peserta pelatihan atau 99,91 persen dari total peserta pelatihan. Jumlah tersebut didapatkan dari pelatihan dalam negeri, pelatihan luar negeri, dan pelatihan mandiri. Pada tahun berikutnya, Pusbindiklatren akan melaksanakan *pilot project* pelatihan bauran dan *on the job training* (OJT).



4. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Dalam Indikator Kinerja Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu 85-89.9 persen. Berdasarkan realisasi di tahun 2022, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut. Capaian realisasi Pusbindiklatren untuk indikator kinerja ini adalah 100 persen.

5. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam indikator kinerja Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu 80. Berdasarkan data realisasi di tahun 2022, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut dengan capaian sebesar 94.42. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusbindiklatren terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

6. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Dalam indikator kinerja Indeks Kepuasan atas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu sebesar 90. Pada tahun 2022, Pusbindiklatren telah dapat melampaui target tersebut dengan realisasi mencapai 93.65. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusbindiklatren terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pusbindiklatren mengelola anggaran sebesar Rp74,210,726,000 yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) Pusbindiklatren sebesar Rp40.020.816.000 dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp34.189.910.000 (*loan* PHRD IV Rp29.716.910.000 dan COREMAP-CTI Rp4.473.000.000). Realisasi total RM adalah Rp39.294.064.698 (98,18 persen) dan realisasi total PLN adalah Rp25.542.949.091 (74,71 persen). Secara keseluruhan, total realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2022 sebesar Rp64.837.013.689 atau 87,37 persen dari total anggaran.

C. Rencana Tindak Lanjut ke Depan

Berdasarkan realisasi dan capaian diatas, Pusbindiklatren melalui keempat kelompok kerjanya akan melakukan beberapa tindak lanjut guna mendukung pencapaian indikator kinerja Pusbindiklatren sebagaimana tercantum dalam PK Kepala Pusbindiklatren. Berbagai



rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren pada tahun 2023 antara lain:

1. Pokja 0 (Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan)

- a. Pembaruan secara menyeluruh informasi dan tampilan yang berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jabatan fungsional perencana pada laman *website* Pusbindiklatren.
- b. Pengembangan visualisasi hasil tabulasi kuesioner, *create* sertifikat bagi pengajar, pengelompokan sistem penilaian pada aplikasi Sintesa.
- c. Evaluasi Majalah Simpul Perencana dan penyesuaian jumlah terbitan dalam satu tahun.
- d. Penyelenggaraan program yang berkaitan dengan diseminasi hasil pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*), seperti: *workshop* penulisan karya tulis ilmiah, *sharing session* dan temu alumni, dan *ministerial lecture*.
- e. Pembaharuan format pelaksanaan kegiatan Obrolan Djoemat Pagi, Buka Warung IDW (*Integrated Digital Workspace*), dan Klinik ASN Perencana.
- f. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- g. Pembaharuan Standar Pelayanan, terutama Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Tamu Luring.

2. Pokja 1 (Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan)

- a. Pelaksanaan *On The Job Training* yang meliputi
 - Penyusunan naskah kerja sama dengan para institusi mitra;
 - Evaluasi pelaksanaan *pilot project* OJT.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan *pilot project* pelatihan bauran (*hybrid*) untuk perbaikan di masa mendatang.
- c. Melanjutkan fasilitasi HCDP kepada K/L/D dan melakukan harmonisasi serta koordinasi fasilitasi HCDP dengan LAN.
- d. Mengidentifikasi potensi dan mengembangkan skema-skema pembiayaan *co-funding* yang bisa dikerjasamakan dengan mitra K/L/D maupun mitra pembangunan lainnya.

3. Pokja 2 (Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan)

- a. Mengimplementasikan *pilot project* OJT
- b. Mengimplementasikan *pilot project* pelatihan bauran
- c. Mengimplementasikan seleksi wawancara untuk calon penerima beasiswa pendidikan



4. Pokja 3 (Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana)

- a. Melanjutkan rencana kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi JFP bagi para calon peserta uji kompetensi
- b. Melanjutkan penyusunan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020
- c. Melaksanakan Seminar Nasional JFP dalam rangka (1) mengetahui dan menampung aspirasi dari para Instansi Pengguna JFP dan (2) implementasi peraturan-peraturan baru dan juga sosialisasi kebijakan pasca program penyetaraan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mengambil sampel instansi dengan jumlah pejabat fungsional perencana hasil penyetaraan terbanyak dan/atau instansi dengan jumlah lulusan uji kompetensi terbanyak
- e. Penyelenggaraan uji kompetensi yang semula berbasis daring/online menjadi luring/*offline*.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022	iv
A. Capaian Indikator Kinerja	iv
B. Capaian Kinerja Anggaran	v
C. Rencana Tindak Lanjut ke Depan	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
E. Sumber Daya Manusia (SDM)	5
F. Potensi dan Isu Strategis	8
G. Sistematika Laporan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2020–2024	11
B. Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2022	11
C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022	16
D. Alokasi Anggaran Tahun 2022	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Pusbindiklatren dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas	19
B. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022	20
BAB IV. PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi 2022 untuk Rencana Aksi 2023	47



LAMPIRAN	50
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusbindiklatren Tahun 2022	51
Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren Tahun 2022	54
Lampiran 3. Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Pelatihan Fungsional Perencana	55
Lampiran 4. Jumlah Total Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2022	58
Lampiran 5. Jumlah Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022	59
Lampiran 6. Realisasi Program Pelatihan	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren	6
Tabel 1.2 Data Jumlah Kebutuhan Jabatan di Pusbindiklatren	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2022	11
Tabel 3.1 Capaian Pusbindiklatren dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas	19
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2022	21
Tabel 3.3 Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2022	22
Tabel 3.4 Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2022	23
Tabel 3.5 Jumlah Target dan Realisasi Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022	24
Tabel 3.6 Realisasi Peserta Pelatihan yang Lulus Pelatihan Tahun 2022	25
Tabel 3.7 Persentase Inovasi Kebijakan yang Diimplementasikan oleh Institusi/ Unit Kerja Perencana Pembangunan	27
Tabel 3.8 Tingkat Penerapan Transparansi	28
Tabel 3.9 Tingkat Kepuasan Layanan	29
Tabel 3.10 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pendidikan	29
Tabel 3.11 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pelatihan	30



Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Perencana yang Lulus Uji Kompetensi Tahun 2021 dan 2022 _____	31
Tabel 3.13 Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2021 dan 2022 _____	32
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Peserta Terlatih Tahun 2021 dan 2022 _____	32
Tabel 3.15 Perbandingan Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren 2021 dan 2022 _____	33
Tabel 3.16 Tindak Lanjut Rekomendasi 2021 _____	34
Tabel 3.17 Daftar Instansi yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Perencana _____	38
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran 2022 _____	41
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Penanggung Jawab _____	42
Tabel 3.20 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 _____	43
Tabel 3.21 Kriteria Efisiensi Anggaran _____	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas _____	5
Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren _____	6
Gambar 2.1 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Pusbindiklatren _____	14
Gambar 2.2 Proses Bisnis Pusbindiklatren _____	15
Gambar 2.3 Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren 2022 _____	17



BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dan tata kelola merupakan salah satu fokus pembangunan yang ingin dicapai pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mencantumkan Arah Kebijakan dan Strategi dari Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Untuk mencapai sasaran pokok, salah satu arah kebijakan yang diterapkan adalah penguatan implementasi manajemen ASN. Berbagai strategi yang dijalankan agar kebijakan berjalan sesuai haluan antara lain penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional. Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, adanya pengembangan dan pembinaan ASN perencana melalui program pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya di bidang perencanaan pembangunan menjadi perlu.

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggung jawab dalam menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas terlibat langsung di dalam tanggung jawab tersebut. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa Pusbindiklatren mengemban tugas fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Peranan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas ini dipertegas di Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020–2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintah, Pusbindiklatren diwajibkan menyampaikan capaian kinerja organisasi tahunan melalui Laporan Kinerja (LKj). Dokumen LKj disusun berdasarkan hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan memperhatikan perjanjian kinerja Kepala Pusbindiklatren. Penyusunan dokumen LKj dilaksanakan tidak hanya berdasar asas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga berorientasi pada perbaikan kinerja kelembagaan melalui inovasi-inovasi program maupun praktik baik yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren sepanjang tahun 2022.



B. Tujuan

Penyusunan LKj ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta penganggaran kegiatan yang berbasis kinerja dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan LKj ini dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan dan perbaikan kegiatan Pusbindiklatren di tahun 2023.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, dalam penyusunan LKj ini mengacu pada Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusbindiklatren telah diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 213 dan Pasal 214. Sebagaimana tercantum dalam pasal 213, Pusbindiklatren memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- b. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- c. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
- f. fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;



- d. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusbindiklatren pada tahun 2022 tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan struktur organisasi di tahun 2021. Pada tahun 2022, Pusbindiklatren terdiri atas empat (4) kelompok kerja (Pokja) dan dibantu oleh para kelompok ahli serta kelompok staf strategis. Tugas dan fungsi dari tiap-tiap Pokja, kelompok ahli, dan staf strategis adalah sebagai berikut.

a. Kelompok Kerja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan (Pokja 0)

Pokja 0 mempunyai tugas dalam merencanakan dan mengembangkan sistem dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan, melakukan penyusunan tata kelola kegiatan, melaksanakan urusan persuratan, pengelolaan keuangan, dokumentasi dan pelayanan kehumasan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 0 terdiri atas empat tim, yaitu

- 1) Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengendalian Anggaran;
- 2) Tim Pengelolaan Administrasi Pusat;
- 3) Tim Humas dan Teknologi dan Informasi; dan
- 4) Tim Pengelolaan Kegiatan Khusus.

b. Kelompok Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan (Pokja 1)

Pokja 1 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengembangan kebijakan teknis, program, kurikulum, dan standar pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Pokja 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 1 terdiri atas tiga tim, yaitu

- 1) Tim Kajian dan Evaluasi Kebijakan;
- 2) Tim Pengembangan Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Tim Perencanaan dan penganggaran Program Pendidikan dan Pelatihan.



c. Kelompok Kerja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan (Pokja 2)

Pokja 2 mempunyai tugas dalam melaksanakan persiapan, seleksi, penempatan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Pokja 2 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 2 terdiri atas tiga tim, yaitu

- 1) Tim Pelaksanaan Pendidikan;
- 2) Tim Pelaksanaan Pelatihan; dan
- 3) Tim Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

d. Kelompok Kerja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Pokja 3)

Pokja 3 mempunyai tugas dalam melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pada instansi pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, Pokja 3 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 3 terdiri atas dua tim, yaitu

- 1) Tim Pengembangan Kebijakan dan penyusunan Regulasi Jabatan Fungsional Perencana; dan
- 2) Tim Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana.

e. Kelompok Ahli

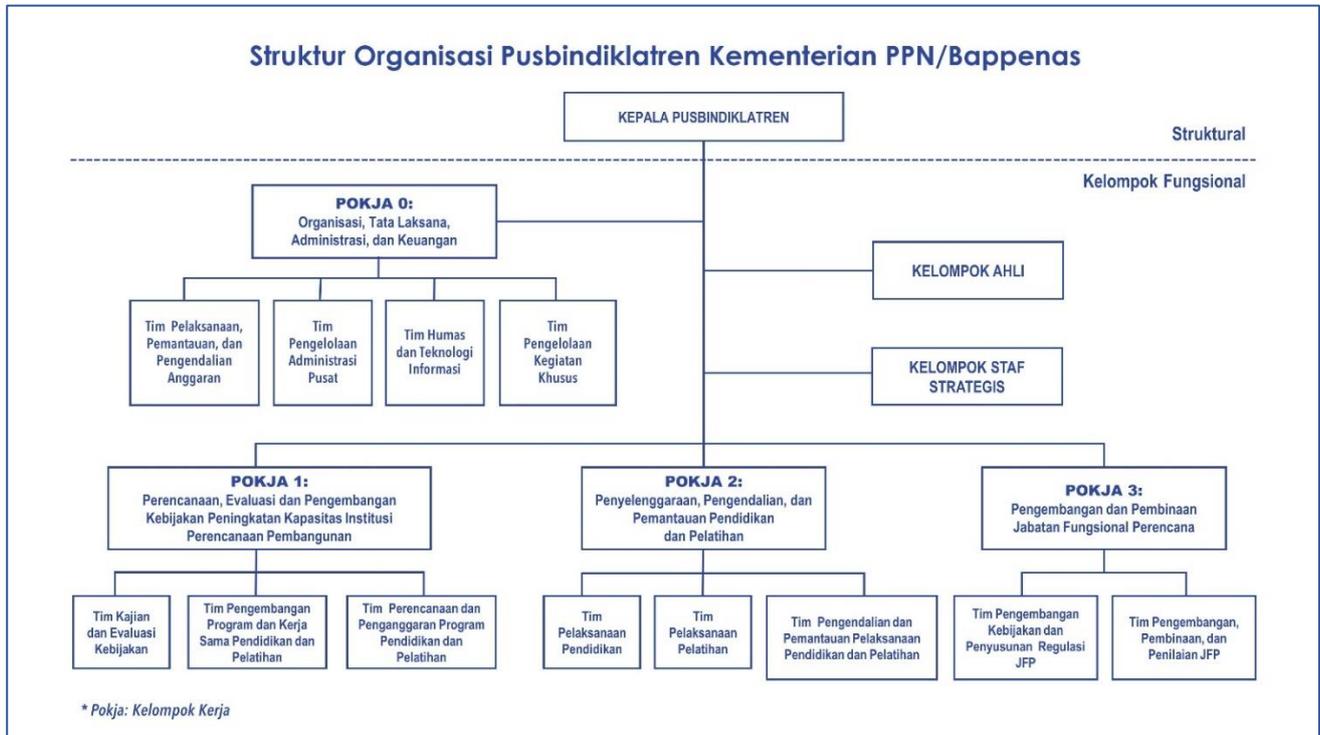
Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif, efisien, dan dapat diimplementasikan atas program dan kegiatan Pusbindiklatren. Kelompok ini terdiri atas fungsional utama, dan tenaga ahli.

f. Kelompok Staf Strategis

Kelompok Staf Strategis mempunyai tugas memberikan analisis atas saran, masukan, dan rekomendasi dari kelompok ahli dan membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pusbindiklatren. Kelompok ini terdiri atas kelompok fungsional dan staf perencana.



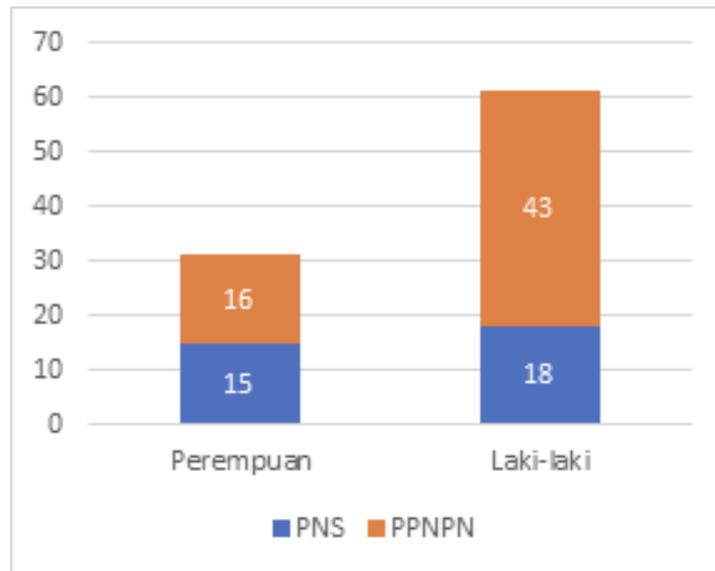
Struktur organisasi Pusbindiklatren secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di Pusbindiklatren pada tahun 2022 yaitu sebanyak 92 orang dengan rincian 33 orang (35.87 persen) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang (64.13 persen) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pegawai, 61 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2022, terjadi perubahan jumlah pegawai jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tiga orang pegawai memasuki masa pensiun dan satu orang pegawai berpindah ke instansi lain. Di sisi lain, Pusbindiklatren memperoleh tambahan dua orang pegawai baru dari formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan satu orang pegawai dari unit kerja lain di Kementerian PPN/Bappenas. Berikut merupakan komposisi SDM Pusbindiklatren berdasarkan status pegawai dan jenis kelamin.



Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren

Berdasarkan kelompok jabatan, PNS Pusbindiklatren terdiri atas satu orang Pejabat Struktural dan 27 orang Pejabat Fungsional. Jika dilihat berdasarkan jenis jabatan fungsionalnya, sebanyak 15 orang berada pada Jabatan Fungsional Perencana, 6 orang pada Fungsional Analis Kebijakan, 4 orang pada Fungsional Widyaiswara, dan 2 orang pada Fungsional Arsiparis. Rincian jumlah pegawai jabatan fungsional beserta jenjang pegawai Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren

No	Fungsional	Jumlah						Total
		Mahir	Calon Ahli Pertama	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1	Widyaiswara	-	-	-	-	1	3	4
2	Perencana	-	2	5	3	3	2	15
3	Analis Kebijakan	-	-	-	3	3	-	6
4	Arsiparis	1	-	-	-	1	-	2
TOTAL								27



Perbandingan jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan SDM eksisting di Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Jumlah Kebutuhan Jabatan di Pusbindiklatren

No	Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Jumlah Pegawai Eksisting		Sisa (+/-)
			PNS	PPNPN	
1	Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	1	1	-	0
2	Widyaiswara Utama	2	3	-	+1
3	Wisyaaiswara Madya	2	1	-	-1
4	Widyaiswara Muda	3	-	-	-3
5	Widyaiswara Pertama	4	-	-	-4
6	Perencana Utama*	-	2	-	+2
7	Perencana Madya	4	3	-	-1
8	Perencana Muda	4	3	-	-1
9	Perencana Pertama	6	5	-	-1
10	Calon Perencana Pertama	-	2	-	+2
11	Staf Perencana	-	1	-	+1
12	Analisis Kebijakan Madya	3	3	-	0
13	Analisis Kebijakan Muda	4	3	-	-1
14	Analisis Kebijakan Pertama	1	-	-	-1
15	Arsiparis Madya	-	1	-	+1
16	Arsiparis Mahir	-	1	-	+1
17	Arsiparis Terampil	1	-	6	+5
18	Pranata Komputer Muda	1	-	-	-1
19	Pranata Komputer Pertama	7	-	4	-3
20	Pustakawan Pertama	2	-	-	-2
21	Pranata Keuangan APBN Terampil	15	-	9	-6
22	Sekretaris	1	-	1	0
23	Analisis Kinerja	4	-	-	-4
24	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	10	-	14	+4
25	Perancang Grafis	2	-	2	0
26	Pengadministrasi Umum/Tata Usaha	1	3	4	+6
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	+1
28	Pengelola Data Pencairan Dana	-	-	2	+2



No	Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Jumlah Pegawai Eksisting		Sisa (+/-)
			PNS	PPNPN	
29	Pengelola Layanan Kehumasan	-	-	2	+2
30	Pranata Pengadaan Barang/Jasa	-	-	2	+2
31	Pramubakti	-	1	-	+1
32	Satpam**	-	-	5	+5
33	OB**	-	-	5	+5
34	Pengemudi**	-	-	2	+2
	Jumlah	78	33	59	+14

* berasal dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

** berasal dari Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas

Kebutuhan pegawai Pusbindiklatren 2022 sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.7/SES/HK/01/2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kementerian PPN/Bappenas adalah 78 orang. Tabel 1.2 di atas membandingkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan kondisieksisting pegawai Pusbindiklatren saat ini. Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa analisis kondisi SDM Pusbindiklatren saat ini terdapat selisih kelebihan sebanyak 14 orang termasuk pegawai dukungan yang berasal dari Biro SDM dan pegawai dari lingkup Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Selain itu, terdapat beberapa jabatan dari pegawai Pusbindiklatren yang tidak tercantum dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga Pusbindiklatren akan mengusulkan revisi kebutuhan pegawai dikarenakan jabatan tersebut merupakan jabatan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbindiklatren.

F. Potensi dan Isu Strategis

Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang bergerak di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ASN perencana, Pusbindiklatren memiliki sejumlah potensi dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan Pusbindiklatren meliputi beberapa hal berikut.

1. Kerangka Regulasi

Kebijakan pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana meliputi (i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana; (ii) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi



Nasional Indonesia (KKNI) Perencanaan Pembangunan; (iii) PermenPANRB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; (iv) PermenPANRB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; (v) PermenPANRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan (vi) Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Keenam kebijakan tersebut berimplikasi terhadap proses bisnis Pusbindiklatren. Oleh karena itu, selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren menyusun petunjuk teknis, panduan operasional, dan melaksanakan edukasi serta advokasi kepada pemangku kepentingan atas implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana.

2. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di ranah pendidikan dan pelatihan ASN bidang perencanaan serta pengembangan dan pembinaan JFP, Pusbindiklatren selama ini memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan dari pemanfaatan sumber dana tersebut. Selain pendanaan APBN/PHLN yang terbatas, kebijakan Kementerian Keuangan yang tidak lagi memperbolehkan pinjaman luar negeri sebagai sumber pendanaan program pendidikan juga menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Pusbindiklatren untuk keberlanjutan program/kegiatan yang diselenggarakan. Untuk itu, Pusbindiklatren kini perlu menjajaki dan mengeksplorasi peluang sumber pendanaan alternatif baru melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Penjajakan peluang ini dilaksanakan sebagai upaya melaksanakan tuisi fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pembinaan JFP.

3. Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusbindiklatren

- a. Terdapat sejumlah Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang sampai saat ini masih belum memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai yang komprehensif. Oleh sebab itu, Pusbindiklatren kemudian memberikan pembimbingan/fasilitasi penyusunan dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada K/L/D. Tujuan dari fasilitasi tersebut adalah untuk membantu K/L/D dalam mengoptimalkan upaya pengembangan SDM untuk pemenuhan kebutuhan organisasi.
- b. Selama tahun 2022, Pusbindiklatren telah menyelenggarakan pelatihan dalam jaringan (*daring/online*) dengan baik. Namun, pelaksanaan pelatihan daring masih mengalami kendala teknis maupun non-teknis. Kendala kualitas jaringan hingga efektivitas penyampaian materi pelatihan merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh Pusbindiklatren. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pelatihan daring di tahun 2023.
- c. Pusbindiklatren kini tengah mengupayakan adanya peralihan metode pelatihan dari klasikal menjadi non-klasikal. Penyusunan rencana desain pelatihan non-



klasikal sudah dimulai pada tahun 2021. Rencana tersebut disusun oleh Pusbindiklatren dalam rangka mengadopsi konsep *Corporate University* (Corpu). Untuk mewujudkan konsep Corpu ini, Pusbindiklatren perlu menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah.

- d. Pusbindiklatren direncanakan akan memiliki sarana gedung diklat pada tahun 2023. Untuk itu, Pusbindiklatren harus mempersiapkan sumber daya manusia dan struktur pendukung pencapaian prinsip Corpu. Diharapkan di masa mendatang, Pusbindiklatren menjadi pusat pengembangan kompetensi sertifikasi perencanaan nasional.

Selain ketiga aspek isu di atas, perubahan peran Pusbindiklatren di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024 juga menjadi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pusbindiklatren. Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat dari Presiden sebagai *clearing house* dalam proses perencanaan pembangunan. Implikasinya, Pusbindiklatren mendapatkan mandat sebagai pemampu/*enabler* perencanaan pembangunan. Untuk menyelaraskan mandat tersebut dengan tugas yang diemban, Pusbindiklatren perlu menyiapkan desain program/kegiatan penunjang percepatan proses *clearing house*.

G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pusbindiklatren Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang; tujuan; dasar hukum; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan strategis Pusbindiklatren; serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kerja; serta alokasi anggaran Pusbindiklatren tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2022. Capaian kinerja organisasi mencakup capaian indikator kinerja, perbandingan capaian kinerja 2021 dan 2022, serta capaian kinerja lainnya. Realisasi anggaran mencakup pembahasan mengenai capaian realisasi anggaran dan perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan kinerja Pusbindiklatren dan tindak lanjut yang akan dilakukan Pusbindiklatren.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020–2024

Perencanaan Kinerja Pusbindiklatren disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas tahun 2020-2024. Indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah (1) terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (2) terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan (3) terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Pusbindiklatren mendukung indikator **(a) terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (b) terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan (c) terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**. Kedua indikator tersebut diturunkan ke dalam sasaran kegiatan/*output* Pusbindiklatren yaitu penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

B. Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2022

Kepala Pusbindiklatren telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan target Indikator Kinerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Indikator SS 1.1:		
	Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi		
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi	70 %



No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
		Persentase karyawan yang Lulus Pendidikan	75 %
		Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	92 %
2	Indikator SS 3.2: Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan		
	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	85 %—89.9 %
3	Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80
4	Indikator SS 4.2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan		
	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	90

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, PK Pusbindiklatren mengalami penambahan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan dan (2) Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Kamus indikator kinerja Pusbindiklatren dalam PK Pusbindiklatren Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Perencana yang Lulus Uji Kompetensi adalah Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi untuk naik jenjang dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama yang lulus uji kompetensi pada akhir pelatihan. Formula



- yang digunakan adalah persentase jumlah perencana yang lulus uji kompetensi dibandingkan dengan jumlah perencana yang mengikuti uji kompetensi.
- b. Karyasiswa yang lulus program pendidikan adalah karyasiswa yang berhasil lulus program pendidikan pada tahun yang dijadwalkan atau ditargetkan. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pendidikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pendidikan pada tahun berjalan.
 - c. Peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan adalah peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus dalam program pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan K/L/D. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah peserta pelatihan yang lulus program pelatihan dibandingkan dengan jumlah total peserta yang mengikuti pelatihan.
 - d. Inovasi Kebijakan/Program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana adalah kebijakan/program inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan Pengembangan diklat yang diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran dibandingkan dengan jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dihasilkan.
 - e. Penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan Pusbindiklatren dalam melaksanakan pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menerapkan transparansi dan standar pelayanan untuk mendukung pelayanan Pusbindiklatren yang berintegritas dan terbuka bagi seluruh *stakeholders*. Formula yang digunakan adalah capaian hasil survei penilaian *stakeholder* terhadap penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - f. Tingkat Kepuasan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Formula yang digunakan adalah capaian hasil survei penilaian kepuasan *stakeholder* terhadap layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

1. **Cascading Indikator Kinerja Pusbindiklatren 2022**

Tahapan pertama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren adalah penyusunan pemetaan Indikator Kinerja Pusbindiklatren. Gambar 2.1 berikut ini menunjukkan penjabaran dari indikator dan target Pusbindiklatren sebagaimana yang telah ditetapkan.



CASCADING INDIKATOR KINERJA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA TAHUN 2022		
IKU ES II	NO	KEGIATAN
1. Persentase Perencana yang lulus uji kompetensi	A	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan
	1	SES.P22.11.P01.1.1 Kajian dan Evaluasi Kebijakan Pusbindiklatren
	2	SES.P22.11.P01.1.2 Pengembangan Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
2. Persentase karyasiswa yang lulus pendidikan	3	SES.P22.11.P01.1.3 Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan dan Pelatihan
	B	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan
	1	SES.P22.11.P01.2.1 Pelaksanaan Pendidikan
3. Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	2	SES.P22.11.P01.2.2 Pelaksanaan Pelatihan
	3	SES.P22.11.P01.2.3 Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Diklat
	C	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
4. Persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan	1	SES.P22.11.P01.3.1 Pengembangan Kebijakan dan Penyusunan Regulasi
	2	SES.P22.11.P01.3.2 Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional
	D	Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan
5. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1	SES.P22.11.P01.0.1 Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemantauan Anggaran
	2	SES.P22.11.P01.0.2 Pengelolaan Administrasi Pusat
	3	SES.P22.11.P01.0.3 Pengelolaan Humas, Teknologi dan Informasi
	4	SES.P22.11.P01.0.4 Pengelolaan Kegiatan Khusus
6. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan		

Gambar 2.1 Cascading Indikator Kinerja Pusbindiklatren

Sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dijalankan oleh Kepala Pusbindiklatren dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh Ketua Pokja sebagai koordinator dari Tim Pokja di bawahnya, Tenaga Ahli, dan Kelompok Staf Strategis.

Pengukuran program yang dijalankan oleh Pusbindiklatren dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja. Pada tahun 2022, indikator kinerja Pusbindiklatren terdiri atas enam indikator, yaitu (1) Persentase Perencana yang lulus uji kompetensi; (2) Persentase karyasiswa yang Lulus Pendidikan; (3) Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan; (4) Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan; (5) Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; serta (6) Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Kontribusi setiap kelompok kerja dalam pencapaian sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target sebagai berikut.



- a. Indikator persentase Perencana yang lulus uji kompetensi didukung oleh Pokja 3 dan Pokja 2.
- b. Indikator persentase karyasiswa yang lulus pendidikan didukung oleh Pokja 2, Pokja 1, dan Pokja 0.
- c. Indikator persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan didukung oleh Pokja 2, Pokja 1, dan Pokja 0.
- d. Indikator persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan didukung oleh seluruh Pokja.
- e. Indikator tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan didukung oleh seluruh Pokja.
- f. Indikator tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan didukung oleh seluruh Pokja.

2. Proses Bisnis (*Business Process*) Pusbindiklatren

Proses bisnis Pusbindiklatren dalam pencapaian tujuan nasional melalui Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, dijelaskan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Proses Bisnis Pusbindiklatren



Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tugas yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah memberikan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, fungsi yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijalankan (1) kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas (a) Pokja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan; (b) Pokja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan; (c) Pokja Pengembangan dan Pembinaan JFP, dan (d) Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan; (2) kelompok ahli; dan (3) kelompok staf strategis.
- c. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren diharapkan mampu meningkatkan (1) kompetensi SDM perencana; (2) kapasitas institusi perencanaan; dan (3) sinergi perencanaan untuk mencapai tujuan nasional;
- d. Perencanaan pembangunan berkualitas merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional. Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan lembaga donor.

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022

Pencapaian indikator kinerja diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pusbindiklatren. Pembagian tugas dari tiap-tiap kegiatan tersebut dilakukan para koordinator tim yang relevan.



RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA TAHUN 2022																					
IKU ES II	NO	KEGIATAN	WAKTU/BULAN PELAKSANAAN												ALOKASI SDM		KETERANGAN				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Koordinator	Anggota Tim					
1. Persentase Perencana yang lulus uji kompetensi	A	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan SES.P22.11.P01.1.1 Kajian dan Evaluasi Kebijakan Pusbindiklatren															Teresna Murti, SH, MPM	staf pusbindiklatren dan PIC Kurikulum			
			2	SES.P22.11.P01.1.2 Pengembangan Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan														Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.	staf pusbindiklatren		
			3	SES.P22.11.P01.1.3 Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan dan Pelatihan															Dwi Harini Septaning Tyas, SE, MA	staf pusbindiklatren	
4. Persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan	B	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan SES.P22.11.P01.2.1 Pelaksanaan Pendidikan															Wiky Witarni, S.Sos, MA	staf pusbindiklatren			
			2	SES.P22.11.P01.2.2 Pelaksanaan Pelatihan														Ali Muharam, SIP, MSE, MA	staf pusbindiklatren		
			3	SES.P22.11.P01.2.3 Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Diklat															Feita Puspita Murti, SE, MAP	staf pusbindiklatren	
5. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	C	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional SES.P22.11.P01.3.1 Pengembangan Kebijakan dan Penyusunan Regulasi															M. Iksan Maolana, SH, LL.M	staf pusbindiklatren			
			2	SES.P22.11.P01.3.2 Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional														Rita Miranda, S.Sos, MPA	staf pusbindiklatren		
6. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	D	Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan SES.P22.11.P01.0.1 Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemantauan Anggaran																Pandu Pradhana, ST, MPA	staf pusbindiklatren		
			2	SES.P22.11.P01.0.2 Pengelolaan Administrasi Pusat															Dra. Maslakah Murni, MAP	staf pusbindiklatren	
			3	SES.P22.11.P01.0.3 Pengelolaan Humas, Teknologi dan Informasi																Karyoto, S.Sos	staf pusbindiklatren
			4	SES.P22.11.P01.0.4 Pengelolaan Kegiatan Khusus																Eko Slamet Suratman, SH, M.Si	staf pusbindiklatren

Gambar 2.3 Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren 2022

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusbindiklatren didukung oleh 4 kelompok kerja. Masing-masing kegiatan di kelompok kerja tersebut terbagi dalam koordinasi tim-tim. Terdapat 12 tim yang terdiri dari 3 tim di Pokja 1; 3 tim di Pokja 2; 2 tim di Pokja 3; dan 4 tim di Pokja 0.

D. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Jumlah alokasi anggaran Pusbindiklatren tahun 2022 adalah Rp74.210.726.000 yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) Rp32.965.359.000, RM Pendamping Rp3.021.998.000, Lintas Bidang Sewa Rumah Rp1.555.508.000, Lintas Bidang Pelatihan, LSP, SPIP dan Perjadin LN Rp2.477.951.000 serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp34.189.910.000. Pinjaman Luar Negeri yang dikelola Pusbindiklatren pada tahun 2022 yaitu program PHRD IV (Rp29.716.910.000) dan COREMAP-CTI (Rp4.473.000.000).



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusbindiklatren dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024. Kontribusi Pusbindiklatren dalam pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana tercantum dalam PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020–2024, dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Capaian Pusbindiklatren dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Keterangan	Tahun					Total
				2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	01- Meningkatnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi	Target Renstra	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	2.250 orang
			Capaian Pusbindiklatren	557 orang	823 orang	1.137 orang	-	-	2.517 orang
			% capaian terhadap Renstra	124%	183%	253%	-	-	112%
		Jumlah karyasiswa yang lulus pendidikan	Target Renstra	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250 orang
			Capaian Pusbindiklatren	334 orang	369 orang	399 orang	-	-	1.102 orang
			% capaian terhadap Renstra	134%	148%	135%	-	-	83%
	Jumlah peserta	Target Renstra	675 orang	675 orang	675 orang	675 orang	675 orang	3.375	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Keterangan	Tahun					Total
				2020	2021	2022	2023	2024	
		terlatih	Capaian Pusbindiklatren	1.708 orang	1.952 orang	1.228 orang	-	-	4.888
			% capaian terhadap Renstra	253%	289%	182%	-	-	145%
		Tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraaan diklat dan JFP	Target Renstra	Puas	Puas	Puas	Puas	Puas	-
			Capaian Pusbindiklatren	Puas	Puas	Puas	-	-	-

Di dalam Renstra sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.1, indikator yang digunakan merupakan indikator sebelum Pusbindiklatren melakukan pemutakhiran atau revisi Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara keseluruhan, pada tahun 2022 capaian kinerja Pusbindiklatren telah melampaui target dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Target kinerja 2020—2024 untuk 3 dari 4 Indikator telah tercapai pada pelaksanaan tahun 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya kapasitas pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi di masa pandemi dengan menggunakan metode daring (*online*) yang berimplikasi pada rendahnya biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan metode luring (*offline*). Dengan tingginya capaian penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan.

B. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022

1. Capaian Indikator Kinerja (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

Pada tahun 2022, Pusbindiklatren telah melakukan pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat beberapa perubahan dari IKU 2021, diantaranya yaitu jumlah IKU yang semula 4 indikator menjadi 6 indikator. Di samping itu, target pencapaian untuk indikator dari sasaran kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan mengalami perubahan dari yang semula menggunakan target jumlah menjadi target persentase. Berikut merupakan detail capaian indikator kinerja Pusbindiklatren pada tahun 2022 berdasarkan Sasaran Strategis/Program dan IKU Pusbindiklatren.



Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2022

No.	Sasaran Strategis/Program	Sasaran Kegiatan/Output	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi	70 %	89,59%	Melampaui Target
			Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan	75 %	84,66%	Melampaui Target
			Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	92 %	99,91%	Melampaui Target
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	85—89.9%	100%	Melampaui Target
3	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80	94,42	Melampaui Target
		Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	90	93,65	Melampaui Target



Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, keenam IKU Pusbindiklatren telah melampaui target capaian. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Pusbindiklatren merupakan unit kerja pelaksana tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban tugas sebagai Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Perencana. Sebagaimana ketentuan pada PermenPANRB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana. Pada tahun 2022, uji kompetensi diselenggarakan bagi Fungsional Perencana yang akan naik jenjang dan PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Perencana dengan total peserta uji kompetensi 2.254 orang. Jumlah ini didominasi oleh PNS yang akan berpindah jabatan ke dalam jabatan fungsional perencana berjumlah 1.860 orang dengan jumlah peserta yang lulus 784 orang.

Dari indikator jumlah pejabat fungsional perencana yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2022, Pusbindiklatren menargetkan 70% dari peserta uji kompetensi untuk bisa lulus dan dinyatakan kompeten. Penghitungan indikator ini didapatkan dari peserta uji kompetensi dari Fungsional Perencana yang akan naik jenjang dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama yang mengikuti uji kompetensi pada akhir pelatihan. Jumlah Perencana yang lulus uji kompetensi adalah 353 atau 89,59% dari total peserta 394 orang. Perincian peserta yang mengikuti dan lulus uji kompetensi dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel.3.3 Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2022

KEGIATAN		PENILAIAN AKHIR UJI KOMPETENSI				
		JUMLAH PESERTA			PERSENTASE	
		Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Uji Kompetensi		157	116	41	73,89%	26,11%
1	Kenaikan Jenjang ke Ahli Muda	104	69	35	66,35%	33,65%
2	Kenaikan Jenjang ke Ahli Madya	53	47	6	88,68%	11,32%
Uji Kompetensi melalui Pelatihan		237	237	0	100%	0
1	Fungsional Ahli Pertama	237	237	0	100%	0
Total Keseluruhan		394	353	41	89,59%	10,41%



Dalam rangka mendorong kelulusan peserta uji kompetensi, pada tahun 2022 Pusbindiklatren telah mengadakan pembekalan bagi calon peserta Uji Kompetensi JFP jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Selain itu, dalam proses Uji Kompetensi JFP Ahli Utama, Pusbindiklatren juga telah memfasilitasi pembimbingan terhadap peserta dalam proses penyusunan *policy paper* yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam Uji Kompetensi JFP jenjang Ahli Utama. Namun peserta Uji Kompetensi JFP jenjang Ahli Utama merupakan peserta dengan tujuan untuk perpindahan jabatan. Untuk tahun berikutnya, Pusbindiklatren akan mengidentifikasi kemungkinan penambahan jumlah pelaksanaan pembekalan uji kompetensi untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

b. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Indikator karyasiswa yang lulus pendidikan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan dengan jumlah target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan. Capaian indikator persentase karyasiswa yang lulus pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2022

Keterangan	Jumlah
Realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan	276
Target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan	326
PERSENTASE KARYASISWA YANG LULUS PENDIDIKAN	84,66%

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat diketahui bahwa ketercapaian indikator persentase karyasiswa yang lulus pendidikan adalah 84,66%. Capaian indikator tersebut telah melampaui target kinerja Pusbindiklatren tahun 2022, yaitu 75%. Rincian komponen pencapaian indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.5.



Tabel 3.5 Jumlah Target dan Realisasi Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022

Tahun Penempatan (angkatan)	Program	Jumlah Target Karyasiswa Lulus	Jumlah Realisasi Karyasiswa Lulus
2020	S-2 Dalam Negeri	216	189
	S-2 Dalam Negeri Afirmasi	43	37
	S-2 Dalam Negeri <i>Smart City</i>	18	14
	S-2 Linkage Premium	20	15
	S-2 Linkage SSMP	7	2
	S-2 Linkage PHRD-IV	17	14
	S-2 Luar Negeri COREMAP-CTI	5	5
TOTAL		326	276

Tabel 3.5 menunjukkan rincian jumlah target dan realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus program pendidikan pada tahun 2022. Karyasiswa yang dijadwalkan untuk lulus di tahun 2022 merupakan karyasiswa dari angkatan tahun 2020. Terdapat 326 karyasiswa yang ditargetkan lulus di tahun 2022, jumlah tersebut telah dikurangi 2 orang karyasiswa pada program S-2 dalam negeri yang tidak dapat menyelesaikan studi karena mengundurkan diri (1 orang) dan meninggal dunia (1 orang). Dari total 399 orang karyasiswa yang lulus pada tahun 2022, realisasi kelulusan dari karyasiswa yang ditargetkan lulus pada tahun 2022 adalah 260 orang. Indikator kelulusan dari karyasiswa ditentukan dari surat pengembalian yang dikeluarkan Pusbindiklatren, ijazah, surat keterangan lulus, serta informasi yang valid dari program studi/universitas maupun dari instansi asal karyasiswa.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakkelulusan karyasiswa yang ditargetkan lulus di tahun 2022 diantaranya adalah kesulitan dalam menghadapi perkuliahan pada periode pandemi, kesulitan dalam pengumpulan data tesis selama pandemi, kesulitan dalam melakukan publikasi ilmiah sebagai syarat sidang maupun kelulusan, persyaratan tambahan untuk kelulusan bagi karyasiswa *linkage*, serta berbagai faktor non-akademis dari masing-masing karyasiswa. Sebagai pemberi beasiswa, Pusbindiklatren telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kelulusan karyasiswa diantaranya yaitu dengan melakukan pemantauan progres penyelesaian studi karyasiswa, pemantauan karyasiswa zona merah (yang telah mendekati dan melewati batas waktu studi), memfasilitasi keperluan publikasi ilmiah karyasiswa melalui jurnal yang dikelola Pusbindiklatren, serta secara aktif berkomunikasi dengan program studi maupun karyasiswa untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama masa studi.



c. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Pada tahun 2022, Pusbindiklatren menyelenggarakan 13 topik pelatihan dalam negeri dan lima topik pelatihan luar negeri. Berdasarkan kategorinya, pelatihan dalam negeri mencakup pelatihan teknis dan spesifik. Pelatihan teknis merupakan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perencanaan pembangunan. Adapun pelatihan spesifik merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada bidang/sector tertentu yang terkait perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2022 jumlah peserta pelatihan yang lulus dihitung dari peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren dan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing instansi melalui kerja sama dengan Pusbindiklatren. Jumlah peserta pelatihan yang lulus adalah 1.228 orang atau 99,91% dari total peserta 1.229 orang yang mengikuti pelatihan. Sebanyak 1 peserta pelatihan (0,09%) yang tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi syarat persentase minimal kehadiran pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Realisasi peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Peserta Pelatihan yang Lulus Pelatihan Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan	Persentase
PELATIHAN DALAM NEGERI		836	835	99,88%
Pelatihan Teknis				
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	24	24	100%
2	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	74	73	99%
3	Rencana Strategis	78	78	100%
4	PPD RPJMD	124	124	100%
5	<i>Planning and Budgeting</i>	100	100	100%
6	JFP Pertama	187	187	100%
Pelatihan Spesifik				
7	Perencanaan Lingkungan	50	50	100%
8	Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah	24	24	100%
9	Perencanaan Perumahan dan Perkotaan	26	26	100%
10	Kelayakan Proyek	50	50	100%
11	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	25	25	100%
12	Mitigasi Bencana	50	50	100%
13	<i>Basic English Academic Purposes</i>	24	24	100%



No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan	Persentase
PELATIHAN LUAR NEGERI		189	189	100%
1	<i>Staf Enhancement</i>	11	11	100%
2	<i>International Conference</i>	10	10	100%
3	<i>The Executive Development Programme</i>	78	78	100%
4	<i>Public Administration for Green Economy Development (Workshop 2)</i>	60	60	100%
5	COREMAP	30	30	100%
Total Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri		1.025	1.024	99,94%
PELATIHAN MANDIRI		204	204	100%
1	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	28	28	100%
2	JFP Pertama 1 (Kemenag)	25	25	100%
3	JFP Pertama 1 (Kemenag)	25	25	100%
4	Perencanaan Penganggaran Batch 1 (Kominfo)	28	28	100%
5	Perencanaan Penganggaran Batch 2 (Kominfo)	30	30	100%
6	<i>Monitoring dan Evaluasi (Kominfo)</i>	23	23	100%
7	Perencanaan Penganggaran (ESDM)	9	9	100%
8	Perencanaan Penganggaran 1 (Provinsi Jawa Timur)	18	18	100%
9	Perencanaan Penganggaran 2 (Provinsi Jawa Timur)	18	18	100%
TOTAL PELATIHAN		1.229	1.228	99,91%

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, jumlah peserta pelatihan dalam negeri yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren sebanyak 836 peserta dengan jumlah kelulusan adalah 835 peserta. Dari 836 peserta tersebut, jumlah peserta pelatihan teknis adalah sebanyak 587 orang dan pelatihan spesifik sebanyak 249 orang.

Pada pelatihan luar negeri, terdapat lima jenis dan topik pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren yaitu *Staff Enhancement*, *International Conference*, *The Executive Development Programme*, *Public Administration for Green Economy Development (Workshop 2)*, dan pelatihan COREMAP.

Pada tahun 2022, Pusbindiklatren juga membuka lebih banyak peluang pelaksanaan pelatihan secara mandiri oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan pengembangan kapasitas perencana di pusat dan daerah, utamanya pasca penyetaraan jabatan



fungsional. Melalui pelatihan dengan skema mandiri tersebut, substansi materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga penyampaian materi dapat berjalan dengan lebih efektif serta efisien dari segi anggaran.

d. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Pusbindiklatren, dalam menjalankan tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, menghasilkan inovasi-inovasi kebijakan untuk meraih hasil yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Inovasi Kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana adalah kebijakan inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran.

Berdasarkan indikator inovasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2022 Pusbindiklatren menargetkan 85-89,9 persen inovasi kebijakan yang dihasilkan Pusbindiklatren telah diimplementasikan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan. Dalam praktiknya, sepanjang tahun 2022 Pusbindiklatren telah menghasilkan 8 inovasi kebijakan dan seluruhnya telah berhasil diimplementasikan atau dapat dikatakan pencapaian indikator ini adalah 100%. Kamus yang digunakan dalam pengukuran persentase tersebut adalah Jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran dibandingkan dengan jumlah inovasi kebijakan program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dihasilkan. Daftar Inovasi yang dihasilkan dan Persentase Inovasi Kebijakan yang diimplementasikan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Persentase Inovasi Kebijakan yang Diimplementasikan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

No	Inovasi Kebijakan/Program 2022	Dihasilkan	Diimplementasikan
1	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana	✓	✓
2	Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana	✓	✓



No	Inovasi Kebijakan/Program 2022	Dihasilkan	Diimplementasikan
3	Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana	✓	✓
4	Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi	✓	✓
5	Surat Edaran Kepala Pusbindiklatren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Pengumpulan dan Penilaian Dokumen Keluaran Kinerja Perencana	✓	✓
6	Program pendidikan <i>co-funding</i>	✓	✓
7	Program pelatihan bauran (<i>hybrid</i>)	✓	✓
8	Seleksi wawancara pada program pendidikan	✓	✓
Jumlah		8	8
PERSENTASE INOVASI KEBIJAKAN DIIMPLEMENTASIKAN		100 %	

e. Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan IKU tambahan dari pemutakhiran IKU Pusbindiklatren 2022. Pencapaian indikator ini pada tahun 2022 adalah 94,42. Penghitungan indikator ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dibagikan pada karyawan program pendidikan dan peserta program pelatihan. Hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Tingkat Penerapan Transparansi

Program	Nilai Transparansi
Pendidikan	96,75
Pelatihan	92,09
RATA-RATA	94,42



Berdasarkan Tabel 3.8, nilai transparansi dari program pendidikan adalah 96,75. Nilai ini diperoleh dari komponen kuesioner (1) Pelayanan Staf Pusbindiklatren Sesuai Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN dan (2) Penjelasan Informasi Terkait dengan Pembayaran yang Dilakukan kepada Karyasiswa. Sedangkan nilai transparansi program pelatihan adalah 92,09 yang diperoleh dari komponen kuesioner Transparansi Proses Seleksi.

f. Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan IKU untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan Pusbindiklatren dalam penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terhadap Perencana pusat dan daerah. Penghitungan indikator ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dibagikan pada karyasiswa program pendidikan dan peserta program pelatihan.

Tabel 3.9 Tingkat Kepuasan Layanan

Program	Nilai Kepuasan
Pendidikan	92,45
Pelatihan	94,84
Rata-Rata	93,65

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa pencapaian indikator tingkat kepuasan layanan Pusbindiklatren pada tahun 2022 adalah 93,65. Nilai ini terdiri dari tingkat kepuasan atas layanan penyelenggaraan program pendidikan (92,45) dan program pelatihan (94,84).

Tabel 3.10 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pendidikan

No.	Aspek Penilaian	Nilai Capaian 2022
1	Penyebaran Informasi	92,30
2	Pelayanan Staf	92,60
Rata-Rata		92,45



Tabel 3.10 menunjukkan tingkat kepuasan dari penyelenggaraan program pendidikan Pusbindiklatren 2022 sebesar 92,45. Komponen penilaian dilihat dari tingkat penyebaran informasi (92,30) dan pelayanan staf (92,60). Komponen penyebaran informasi didapatkan dari hasil kuesioner (i) fitur sistem informasi diklat yang disediakan Pusbindiklatren; (ii) penjelasan informasi terkait hak yang diperoleh karyasiswa selama menerima beasiswa Pusbindiklatren. Sedangkan komponen pelayanan staf didapatkan dari hasil kuesioner (i) penyampaian informasi terkait ketentuan program pendidikan dari petugas pemantau; (ii) pelayanan pengaduan keluhan karyasiswa selama perkuliahan oleh petugas pemantau; (iii) pelayanan Pusbindiklatren; (iv) pelayanan lain-lain selama proses studi dari Pusbindiklatren; (v) penjelasan terkait dengan pembayaran tunjangan dari Pusbindiklatren.

Tabel 3.11 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pelatihan

No.	Aspek Penilaian	Nilai Capaian 2022
1	Penyebaran Informasi	95,17
2	Pelayanan Staf	91,53
3	Pendaftaran	97,39
4	Penempatan	95,25
RATA-RATA		94,84

Tabel 3.11 menunjukkan tingkat kepuasan dari penyelenggaraan program pelatihan Pusbindiklatren 2022 sebesar 94,84. Komponen penilaian dilihat dari tingkat penyebaran informasi (95,17), pelayanan staf (92,63), pendaftaran (97,39), dan penempatan (95,25). Komponen penyebaran informasi didapatkan dari hasil kuesioner (i) informasi pelatihan Pusbindiklatren dan akses terhadapnya; (ii) kualitas informasi staf Pusbindiklatren. Komponen pelayanan staf didapatkan dari hasil kuesioner (i) kualitas pelayanan staf Pusbindiklatren; (ii) pelayanan informasi pelatihan yang dilakukan oleh staf Pusbindiklatren. Komponen pendaftaran didapatkan dari kuesioner pendaftaran pelatihan dilakukan berbasis web (*online*). Komponen penempatan didapatkan dari kuesioner penempatan peserta pelatihan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja 2021–2022

Dikarenakan adanya pemutakhiran IKU pada tahun 2022, terdapat penambahan indikator kinerja dan perubahan pengukuran indikator. Perbandingan capaian kinerja tidak dapat dilakukan dengan komprehensif untuk semua IKU 2022. IKU yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu (1) Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan dan (2) Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar



Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Di samping itu, terdapat beberapa IKU yang mengalami perubahan kamus indikator sehingga tidak dapat dibandingkan ketercapaian IKU di masing-masing periode. IKU yang mengalami perubahan kamus indikator adalah IKU persentase perencana yang lulus uji kompetensi dan persentase karyawan yang lulus pendidikan. Rincian perbandingan pencapaian IKU 2022 dan IKU 2021 terdapat dalam uraian berikut ini.

a. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Terdapat perubahan pengukuran indikator ini, pada tahun 2022 yang dimasukkan dalam komponen penghitungan IKU hanya peserta yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana dan tidak mengikutsertakan peserta uji kompetensi untuk perpindahan jabatan. Sedangkan pada tahun 2021, penghitungan menggunakan keseluruhan peserta baik dari kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah kelulusan dari keseluruhan peserta uji kompetensi.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Perencana yang Lulus Uji Kompetensi Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Peserta yang mengikuti uji kompetensi	Peserta yang Lulus Uji Kompetensi
2021	1.362	823
2022	2.491	1.137

Dibandingkan dengan tahun 2021, peserta uji kompetensi tahun 2022 bertambah sebanyak 1.129 peserta (82,89%). Bertambahnya peserta uji kompetensi dipengaruhi oleh (1) regulasi Permen PANRB No. 4 tahun 2020 Pasal 16 yang mengatur perpindahan jabatan dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Perencana harus melalui mekanisme uji kompetensi; dan (2) meningkatnya minat PNS dengan jabatan selain Fungsional Perencana untuk berpindah ke Jabatan Fungsional Perencana.

b. Persentase Karyawan yang Lulus Pendidikan

Perbandingan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi karyawan lulus pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Perbandingan tidak dapat dilakukan dengan persentase dikarenakan adanya perubahan formula pada IKU ini dari tahun sebelumnya. Perbandingan karyawan yang lulus pada program pendidikan tahun 2021 dan 2022 dilakukan dengan melihat jumlah keseluruhan realisasi karyawan lulus dari semua program dan semua angkatan. Dengan demikian jumlah kelulusan tidak hanya karyawan yang ditargetkan lulus di tahun 2022 seperti yang dijelaskan dalam subbab capaian IKU 2022.



Tabel 3.13 Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Realisasi
2021	369
2022	399

Realisasi kelulusan di tahun 2022 meningkat, jumlah angka kelulusan ini didominasi dari kelulusan karyasiswa angkatan 2020. Upaya yang dilakukan Pusbindiklatren untuk mendorong tingkat kelulusan karyasiswa adalah pemantauan karyasiswa zona merah. Selain itu, Pusbindiklatren juga melakukan pengendalian dengan menemui karyasiswa yang mengalami masalah dalam penyelesaian studi dan pengelola program studi dari karyasiswa tersebut.

c. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Pada tahun 2022, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren mencapai 1.229 peserta. Jumlah peserta ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun 2021 yakni sebanyak 1.959 orang. Meskipun demikian, apabila dilihat dari persentase peserta yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, persentase peserta yang lulus pelatihan adalah sebesar 99,64% sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 99,91% sehingga terdapat kenaikan tingkat kelulusan peserta sebesar 0,27%.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Peserta Terlatih Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Peserta yang mengikuti diklat	Peserta yang mendapatkan sertifikat	Persentase Peserta terlatih
2021	1.959	1.952	99,64
2022	1.229	1.228	99,91

Tabel 3.14 menunjukkan rincian perbandingan capaian peserta lulus (mendapatkan sertifikat) pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022 utamanya disebabkan oleh terbatasnya anggaran penyelenggaraan program pelatihan tahun 2022 akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.



d. Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengukuran indikator ini pada tahun 2022 maupun 2021 didasarkan pada hasil kuesioner pendidikan dan pelatihan. Namun, terdapat beberapa perubahan pada komponen kuesioner tersebut. Perbandingan capaian tingkat kepuasan tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Perbandingan Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren 2021 dan 2022

Indikator Kepuasan Program Pendidikan	Nilai Capaian		Indikator Kepuasan Program Pelatihan	Nilai Capaian	
	2021	2022		2021	2022
Penyebaran Informasi	91,29	92,30	Penyebaran Informasi	96,63	95,17
Pelayanan Staf	100	92,60	Pelayanan Staf	99,07	91,53
Pendaftaran	95,94	-	Pendaftaran	97,00	97,39
Penempatan	99,02	-	Penempatan	97,38	95,25
			Kurikulum	79,00	-
RATA-RATA	96,56	92,45	RATA-RATA	93,82	94,84

Dari Tabel 3.15 dapat diketahui terjadi penurunan capaian kepuasan pada program pendidikan sebesar 4,07 yaitu dari 96,56 menjadi 92,45. Sementara untuk program pelatihan, terdapat peningkatan capaian kepuasan sebesar 1,02 yaitu dari 93,82 menjadi 94,84.

3. Capaian Kinerja Lainnya

a. Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan Tahun 2021

Hasil rekomendasi kegiatan Pusbindiklatren tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.16.



Tabel 3.16 Tindak Lanjut Rekomendasi 2021

No.	Rekomendasi 2021	Tindak Lanjut 2022	Dampak Tindak Lanjut
POKJA 0			
1	Penyempurnaan aplikasi <i>dashboard</i> Sintesa, Sipena, dan Wifast	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan fitur sertifikat, daftar hadir, dan juga tabulasi kuesioner pada Sipena • Pengembangan, pemanfaatan, dan <i>grand launching</i> tahap awal Sintesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya akses data dan informasi yang lebih integratif dan menyeluruh dalam satu platform • Sintesa siap dimanfaatkan sebagai pusat <i>database</i> bagi instansi
2	Pengembangan sistem e-Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan edisi Tahun 2022 pada Majalah Simpul Perencana dan JISDeP • Penerbitan Direktori Mini Tesis Tahun 2022 • Pembaharuan Peraturan JFP • Sosialisasi melalui media sosial mengenai e-Perpustakaan Pusbindiklatren 	<ul style="list-style-type: none"> • Update teratur membuat arsip terbitan majalah dan jurnal menjadi lebih teratur • Meningkatnya jumlah pembaca digital majalah dan jurnal • Makin tingginya jumlah kunjungan pada laman E-Perpustakaan <i>Website</i> Pusbindiklatren
3	Pembaharuan <i>website</i> dan profil Pusbindiklatren	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan interface website dengan menambahkan liputan pada slider, pembaharuan logo embedded aplikasi pendukung, views counter, dsb • Pembaharuan liputan secara lebih masif dan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tingginya jumlah kunjungan pada laman <i>Website</i> Pusbindiklatren • Informasi kegiatan Pusbindiklatren semakin terpublikasikan dan diperbaharui berkala
4	Penyempurnaan tata kelola kehumasan Pusbindiklatren	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Survei Layanan Kepuasan • Pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat • Pembaharuan Standar Pelayanan • Pelayanan langsung tatap muka dan tidak langsung (media sosial dan whatsapp) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan feedback kepuasan pelayanan dari masyarakat yang dapat dijadikan bahan evaluasi • Meningkatnya transparansi • Terwujudnya pelayanan prima
POKJA 1			
1	Pelaksanaan <i>On The Job Training</i> bagi SDM perencana sebagai pilot project penerapan pelatihan non-klasikal.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun pedoman • Telah dilakukan peninjauan terhadap institusi mitra pelaksana OJT dalam dan luar negeri • Sosialisasi terhadap instansi sasaran (K/L/D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya instrumen/bahan persiapan pelaksanaan OJT • Teridentifikasi kebutuhan program pelatihan non-klasikal



No.	Rekomendasi 2021	Tindak Lanjut 2022	Dampak Tindak Lanjut
2	Metode pelaksanaan pelatihan bauran yaitu dengan sistem pembelajaran daring dan luring	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Knowledge sharing</i> pelatihan bauran dengan mengambil contoh baik dari instansi yang telah melaksanakan pelatihan bauran (LAN dan beberapa prodi mitra). • Memberikan pemahaman kepada PIC kurikulum Pusbindiklatren mengenai pelaksanaan pelatihan melalui metode bauran • Penyesuaian kurikulum pelatihan dengan menggunakan metode bauran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kurikulum pelatihan dengan menggunakan metode bauran • Penyelenggaraan pelatihan Pusbindiklatren 2023 menggunakan kurikulum dengan metode bauran
3	Pemetaan progres HC DP instansi sasaran program Pusbindiklatren	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pemetaan progres HC DP instansi yang telah mengikuti program fasilitasi HC DP dari Pusbindiklatren • Pelaksanaan fasilitasi dilanjutkan melalui layanan konsultasi ataupun workshop 	Capaian jumlah K/L/D yang telah berhasil menyusun HC DP
POKJA 2			
1	Pelaksanaan program pendidikan dengan pendekatan <i>co-funding</i> dengan kementerian/ lembaga/instansi daerah untuk memaksimalkan anggaran khususnya yang berbasis rupiah murni.	Melakukan persiapan rekrutmen dan seleksi untuk penyelenggaraan program pendidikan dengan mekanisme <i>co-funding</i> .	Diselenggarakannya program beasiswa pendidikan <i>double degree</i> dan dalam negeri dengan mekanisme <i>co-funding</i> dengan pemerintah daerah pada seleksi intake tahun 2023.
2	Pelaksanaan program pelatihan yang lebih inklusif dengan memberikan peluang kepada para penyedia jasa pelatihan secara umum untuk dapat menjadi pelaksana pelatihan yang dibiayai Pusbindiklatren	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan penawaran dan seleksi proposal pelaksana pelatihan teknis, spesifik, maupun pelatihan bahasa Inggris yang terbuka bagi mitra Pusbindiklatren; • Menyelenggarakan fasilitasi program pelatihan mandiri yang diusulkan oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dengan menggunakan kurikulum dan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas 	Terlaksananya program pelatihan baik melalui mekanisme reguler (seleksi proposal pelaksana pelatihan oleh Pusbindiklatren) pada berbagai topik pelatihan, maupun pelatihan secara mandiri oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas.
3	Penyelesaian administrasi <i>closing date</i> Proyek Coremap-CTI untuk komponen pengembangan kapasitas berlangsung dengan baik dan akuntabel	Menyelesaikan administrasi <i>closing date</i> Proyek COREMAP-CTI untuk komponen pengembangan kapasitas dengan baik dan akuntabel dengan penyerapan anggaran mencapai 99,98%	Tercapainya target penyelenggaraan proyek Coremap-CTI.



No.	Rekomendasi 2021	Tindak Lanjut 2022	Dampak Tindak Lanjut
POKJA 3			
1	Pemanfaatan aplikasi Sikeren untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana oleh instansi perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah	Sudah banyak instansi yang mendaftar untuk mendapatkan hak akses bagi pakai aplikasi Sikeren dalam menunjang penilaian Kinerja JFP	Pusbindiklatren sementara belum dapat melayani permohonan hak akses bagi pakai aplikasi Sikeren, karena terbentuk peraturan-peraturan baru yang masih berubah-ubah
2	Penerbitan sertifikat bagi peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana saran dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian PANRB	Sudah dilakukan penerbitan sertifikat bagi peserta Uji Kompetensi JFP sejak tahun 2022, bahkan bagi para peserta ukom dari jalur perpindahan jabatan ditambahkan AK awal dari pengalaman bekerja di Perencanaan.	Para calon PFP jadi terfasilitasi dalam proses pengangkatan dalam JFP karena dokumen sesuai dengan persyaratan dari <i>stakeholder</i> terkait
3	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan setiap bulan pada mulai April sampai November 2022	Selama tahun 2022 telah dilaksanakan uji kompetensi JFP sebanyak 5 gelombang, yaitu pada bulan April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember	Terfasilitasinya sebanyak 2.254 peserta yang dipanggil dan mengikuti uji kompetensi JFP untuk semua jenjang.
4	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana bekerja sama dengan universitas/prodi pelaksana Pelatihan Fungsional Perencana	Dilaksanakannya kegiatan pembekalan bagi para peserta uji kompetensi JFP, workshop/bimtek/fasilitasi JFP bagi para Instansi Pengguna JFP	Terfasilitasinya para pendaftar uji kompetensi dalam pembekalan uji kompetensi; terfasilitasinya para Instansi Pengguna JFP dalam mendapatkan informasi terkait dengan JFP beserta peraturan-peraturannya.

b. Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2022

Tahun 2022, Pusbindiklatren telah melakukan beberapa inovasi yang dijelaskan dalam uraian berikut ini.

- 1) Asesmen Calon Asesor (ACA).** Kegiatan ACA merupakan kegiatan untuk menguji para peserta diklat asesor kompetensi sehingga layak untuk direkomendasikan sebagai asesor yang akan bertugas di LSP Perencanaan Pembangunan Indonesia. Pada kegiatan ACA ini, para calon asesor diminta menunjukkan hasil belajarnya selama empat hari diklat di depan Master Asesor Penguji dalam hal melakukan asesmen. Para calon asesor diminta untuk melakukan *role play assessment*, yaitu menyimulasikan alur asesmen sesuai dengan standar asesmen yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi



Profesi (BNSP). Master Asesor Penguji mengamati dan memeriksa dokumen yang dihasilkan calon asesor selama kegiatan *role play* tersebut.

- 2) **Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa.** Direktori ini merupakan inovasi Pusbindiklatren yang bertujuan untuk mengarsipkan dan mempublikasikan hasil karya tulis dari para alumni karyasiswa Pusbindiklatren. Pusbindiklatren memiliki banyak sekali alumni, namun hanya beberapa alumni yang telah mempublikasikan hasil karya tulisnya. Karya tulis ini tidak hanya sebagai bahan pertanggung jawaban dari Karyasiswa atas beasiswa yang telah diberikan Pusbindiklatren, tetapi Pusbindiklatren melihat bahwa karya tulis tersebut dapat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan dan masyarakat luas. Dengan dasar hal ini maka dibentuklah sebuah Direktori yang berisi abstrak dari setiap karya tulis dari alumni Karyasiswa Pusbindiklatren. Karya tulis yang dimasukkan dalam direktori ini hanya karyasiswa yang telah lulus di tahun 2021.
- 3) **Pembaruan Proses Bisnis Perencanaan Pelatihan.** Gagasan ini muncul dari masalah inefisiensi proses bisnis perencanaan pelatihan yang berlaku sebelumnya. Melalui proses bisnis dan linimasa sebelumnya, pelaksanaan pelatihan menumpuk di Semester II. Pembaruan proses bisnis ini bertujuan untuk mengurangi beban kinerja di Semester II dengan cara mengubah linimasa pelaksanaan sejumlah kegiatan dalam perencanaan program pelatihan dan membuka peluang kontrak di awal dengan program studi mitra Pusbindiklatren. Harapannya, pelatihan-pelatihan di Pusbindiklatren dapat diselenggarakan secara merata dalam satu tahun berjalan. Selain itu, kegiatan-kegiatan perencanaan dan persiapan dapat dilaksanakan secara paralel dengan waktu yang lebih leluasa.
- 4) **Pengembangan media sosial Pusbindiklatren.** Adanya perubahan tampilan Instagram yang mempunyai template berbeda dari sebelumnya agar terlihat lebih menarik dan informatif. Perubahan ini menambah pengikut pada beberapa media sosial secara signifikan. Selain itu, secara konten perubahan juga dilakukan dengan menambah program baru, yaitu Instagram *Live* dengan mengajak alumni-alumni yang pernah mengikuti beasiswa Pusbindiklatren sebelumnya untuk berbagi pengalamannya serta tips untuk mengikuti beasiswa Pusbindiklatren kepada *netizen* di instagram Pusbindiklatren.

c. Perkembangan Fasilitas Penyusunan HCDP 2022

Pusbindiklatren mengembangkan kebijakan pengembangan kompetensi bagi PNS Perencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penyusunan rencana penempatan kembali (*re-entry*) peserta diklat di instansinya masing-masing setelah mereka menyelesaikan diklatnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menguatkan pendekatan link and match antara program pendidikan dan pelatihan ASN Perencana yang dikembangkan di Pusbindiklatren dengan kebutuhan ASN Perencana yang kompeten di instansi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pusbindiklatren menginisiasi kegiatan fasilitasi Penyusunan Rencana



Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) sejak tahun 2018.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pusbindiklatren bermula dari pelaksanaan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh para pejabat pembina kepegawaian, pejabat penanggung jawab peningkatan kapasitas SDM dan pejabat perencanaan program di instansi pusat maupun daerah hingga layanan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen HCDP. Metode layanan fasilitasi yang diberikan oleh Pusbindiklatren adalah:

- 1) konsultasi tatap muka langsung, untuk instansi yang datang langsung ke kantor Pusbindiklatren Bappenas;
- 2) konsultasi melalui media elektronik, seperti pesan pendek (*short messages services* atau SMS), aplikasi media sosial seperti WhatsApp, atau surat elektronik (*e-mail*);
- 3) sosialisasi penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan ke instansi atas undangan instansi;
- 4) bimbingan teknis atau *workshop* Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan sesuai kebutuhan K/L/D;
- 5) *knowledge sharing* secara daring antarinstansi pemerintah; dan/atau
- 6) pendampingan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan kepada instansi pusat maupun daerah yang membutuhkan.

Sejauh ini tercatat 58 instansi K/L/D yang telah dilayani konsultasi dan pendampingan penyusunan HCDP oleh Pusbindiklatren. Daftar dan perkembangan penyusunan HCDP untuk masing-masing instansi ditunjukkan dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Daftar Instansi yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Perencana

No.	Nama K/L/D	Status Kemajuan
1	ANRI	Sudah menyusun, perlu diperbaiki
2	BKN, Ropeg	<i>Knowledge sharing</i>
3	BNN	<i>Knowledge sharing</i>
4	BPPT	<i>Knowledge sharing</i>
5	BPS	Sudah menyusun, perlu diperbaiki
6	Kabupaten Bogor	Konsultasi
7	Kabupaten Cirebon	Konsultasi



No.	Nama K/L/D	Status Kemajuan
8	Kabupaten Majalengka	Konsultasi
9	Kabupaten Manokwari	<i>Workshop</i>
10	Kabupaten Mojokerto, Bappeda	Konsultasi
11	Kabupaten Musi Rawas Utara, BKPSDM	Konsultasi
12	Kabupaten Nganjuk, BKD	Konsultasi
13	Kabupaten Ngawi, BKD	Revisi AKD
14	Kabupaten Ogan Ilir, BKPSDM	Sudah menyusun, perlu diperbarui
15	Kabupaten Pegunungan Arfak	<i>Workshop</i>
16	Kabupaten Pesisir Barat	<i>Workshop</i>
17	Kabupaten Probolinggo, BKD	Revisi AKD
18	Kabupaten Solok	Sudah menyusun, perlu diperbaiki
19	Kabupaten Sukabumi	Sudah menyusun
20	Kabupaten Tabalong, BKD	Sudah menyusun, perlu diperbaiki
21	Kabupaten Timor Tengah Utara, Bappeda	Konsultasi
22	Kemendes PD TT, Ropeg	Sedang menyusun
23	Kemendes PD TT, Balilainfo	Konsultasi
24	Kemendes PD TT, Balitmas Pekanbaru	Konsultasi
25	Kemendikbud, Biro Kepegawaian	Sudah menyusun, Eselon 3 & 4
26	Kemenko Bidang Kemaritiman	<i>Workshop</i>
27	Kemenko Bidang Perekonomian	<i>Review</i> Dokumen HCDP 2016
28	Kementerian Kominfo	Sudah menyusun
29	Kementerian Koperasi dan UKM	<i>Workshop</i>
30	Kementerian KUMHAM	<i>Knowledge sharing</i>
31	Kementerian Pariwisata, Ropeg	<i>Knowledge sharing</i>
32	Kementerian PUPR	Konsultasi
33	Kementerian Sosial	<i>Knowledge sharing</i>



No.	Nama K/L/D	Status Kemajuan
34	Kota Bandung, BKPP	Sedang menyusun
35	Kota Bekasi, BKPSDM	Konsultasi
36	Kota Bontang	Sedang menyusun
37	Kota Cilegon	<i>Knowledge sharing</i>
38	Kota Jayapura, BKPP	Konsultasi
39	Kota Palembang, Bappeda	<i>Workshop</i>
40	Kota Pekanbaru, BPPKD	Konsultasi
41	Kota Sorong	<i>Workshop</i>
42	Kota Tasikmalaya	Konsultasi
43	LKPP	Sudah menyusun
44	PPATK	<i>Workshop</i>
45	Provinsi DKI Jakarta, Bappeda	Konsultasi
46	Provinsi Jawa Barat, Bappeda	Revisi aplikasi
47	Provinsi Jawa Barat, BKPSDM	Revisi aplikasi
48	Provinsi Kalimantan Utara	<i>Workshop</i>
49	Provinsi Maluku	<i>Workshop</i>
50	Provinsi Maluku Utara	Sudah menyusun, perlu diperbaiki
51	Provinsi NTT, BPSDM	<i>Workshop</i>
52	Provinsi NTT, DKP	Konsultasi
53	Provinsi Papua Barat, Bappeda	Sedang menyusun
54	Provinsi Papua Barat, BKPSDM	Sedang menyusun
55	Provinsi Papua, Bappeda	<i>Workshop</i>
56	Kota Garut, BKD	Sudah menyusun
57	Kabupaten Sleman, BKPP	Sudah menyusun
58	Kabupaten Bengkalis, BKPSDM	Sudah menyusun



Berdasarkan Tabel 3.17, dapat diketahui bahwa 15 instansi telah berhasil menyusun HCDP. Kegiatan fasilitasi tahun mendatang akan dilanjutkan dengan prioritas target memberikan pendampingan bagi instansi yang sedang menyusun serta yang direncanakan akan menyusun HCDP pada tahun 2023.

4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2022 sebesar Rp64.837.013.689 (enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 87,37 persen dari total anggaran sebesar Rp74.210.726.000 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Rincian realisasi anggaran (data per 31 Desember 2022) sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran 2022

Pembiayaan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Loan	PHRD IV	29.716.910.000	21.070.721.802	70,90%
	COREMAP-CTI	4.473.000.000	4.472.227.289	99,98%
Sub Total		34.189.910.000	25.542.949.091	74,71%
Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni	32.965.359.000	32.375.702.714	98,21%
	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	3.021.998.000	2.981.434.292	98,66%
	Lintas Bidang Sewa Rumah	1.555.508.000	1.548.000.000	99,52%
	Lintas Bidang Pelatihan, LSP, SPIP, dan Perjadin LN	2.477.951.000	2.388.927.592	96,41%
Sub Total		40.020.816.000	39.294.064.598	98,18%
TOTAL		74.210.726.000	64.837.013.689	87,37%

Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui realisasi anggaran sebagai berikut.

- a. Realisasi anggaran PLN sebesar Rp25.542.949.091 (74,71 persen) dari total anggaran Rp34.189.910.000. Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman *Professional Human Resources Development IV (PHRD IV)* dan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)*.
- b. Realisasi anggaran RM sebesar Rp32.375.702.714 (98,21 persen) dari anggaran sebesar Rp32.965.359.000. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh empat Pokja dan lintas Pokja.



- c. Realisasi RMP yang merupakan anggaran pendamping sebesar Rp2.981.434.292 (98,66%) dari total anggaran Rp2.021.998.000. RMP digunakan untuk pelatihan fungsional perencana, pelatihan spesifik *monitoring* dan evaluasi, serta pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran.
- d. Realisasi anggaran lintas bidang sewa rumah sebesar Rp1.548.000.000 (99,52%) dari total anggaran Rp1.555.508.000, anggaran ini digunakan untuk penyewaan kantor arsip dan kantor PPK Pusbindiklatren. Adapun realisasi anggaran lintas bidang pelatihan, LSP, dan perjadin luar negeri adalah sebesar Rp2.388.927.592 (96,41%) dari total anggaran Rp2.477.951.000.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Penanggung Jawab

Unit Kerja		Loan	RM	RMP	Total
POKJA 0	Anggaran (Rp)	10.632.000.000	11.607.778.000	0	22.239.778.000
	Realisasi (Rp)	7.055.609.378	11.471.103.807	0	18.526.713.185
	Persentase	66,36%	98,82%	0,00%	83,30%
POKJA 1	Anggaran (Rp)	0	2.610.986.000	0	2.610.986.000
	Realisasi (Rp)	0	2.578.201.125	0	2.578.201.125
	Persentase	0,00%	98,74%	0,00%	98,74%
POKJA 2	Anggaran (Rp)	23.557.910.000	17.091.295.000	3.021.998.000	43.671.203.000
	Realisasi (Rp)	18.487.339.713	16.712.345.619	2.981.434.292	38.181.119.624
	Persentase	78,48%	97,78%	98,66%	87,43%
POKJA 3	Anggaran (Rp)	0	1.655.300.000	0	1.655.300.000
	Realisasi (Rp)	0	1.614.052.163	0	1.614.052.163
	Persentase	0,00%	97,51%	0,00%	97,51%
Lintas PPK (6259)	Anggaran (Rp)	0	4.033.459.000	0	4.033.459.000
	Realisasi (Rp)	0	3.936.927.592	0	3.936.927.592
	Persentase	0,00%	97,61%	0,00%	97,61%
Total Anggaran Pusbindiklatren	Anggaran (Rp)	34.189.910.000	36.998.818.000	3.021.998.000	74.210.726.000
	Realisasi (Rp)	25.542.949.091	36.312.630.306	2.981.434.292	64.837.013.689
	Persentase	74,71%	98,15%	98,66%	87,37%



Tabel 3.19 berisi informasi mengenai realisasi anggaran berdasarkan penanggung jawab. Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Pokja 1 yaitu sebesar 98,74%. Sementara pencapaian realisasi terendah terdapat pada Pokja 0 yaitu sebesar 83,30%.

5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021—2022

Perbandingan penyerapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel 3.20 di bawah ini. Realisasi anggaran pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan 6,70 persen (dari 94,07% menjadi 87,37%).

Tabel 3.20 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

2021			2022		
Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase
150.318.935.000	141.408.054.392	94,07%	74.210.726.000	64.837.013.689	87,37%

Terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2021 dikarenakan tidak optimalnya penyerapan salah satu kegiatan PHLN di Pusbindiklatren yaitu PHRD IV dengan sumber pendanaan dari JICA. Mekuatnya kurs rupiah terhadap yen Jepang menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya realisasi kegiatan PHRD IV yang hanya mencapai 70,90 persen. Selain itu, kebijakan pembukaan border oleh Pemerintah Jepang pada semester kedua tahun 2022 membuat tidak optimalnya pelaksanaan program pelatihan luar negeri khususnya di Jepang.

Adapun kegiatan PHLN lainnya (COREMAP-CTI dengan sumber pendanaan Bank Dunia) mencapai realisasi 99,98 persen; dan kegiatan dengan sumber pendanaan rupiah murni Pusbindiklatren juga dapat dilaksanakan secara maksimal sebesar 98,18 persen.

6. Analisis Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam pencapaian kinerja. Penghitungan tingkat efisiensi dilakukan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{\% \text{rata-rata capaian kinerja}}{\% \text{rata-rata capaian penyerapan anggaran}}$$



Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan seperti pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Kriteria Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi	Keterangan
≥ 1	terjadi efisiensi
< 1	tidak terjadi efisiensi

Penghitungan tingkat efisiensi Pusbindiklatren tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{92,89\%}{87,37\%} = 1,063$$

Berdasarkan hasil penghitungan, tingkat efisiensi Pusbindiklatren tahun 2022 adalah 1,063 yang berarti bahwa terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Faktor yang mendukung terjadinya efisiensi penggunaan anggaran antara lain:

- Metode pelaksanaan kegiatan koordinasi cenderung dijalankan dengan mekanisme pertemuan *hybrid meeting*;
- Pelaksanaan program pelatihan yang masih dominan dengan metode daring dan beberapa program pelatihan masih dalam metode bauran (*hybrid*);
- Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional perencana yang masih diselenggarakan dengan metode daring untuk seluruh tahapan dan jenjang uji kompetensi;
- Pemantauan dan pengendalian terhadap karyasiswa dan penerima program Pusbindiklatren yang dilakukan dengan aktif dan periodik.
- Pusbindiklatren lebih terbuka terhadap kerja sama pelaksanaan program dengan skema pembiayaan bersama ataupun pembiayaan mandiri dari instansi lain.

Untuk tahun berikutnya, upaya yang dilakukan untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran adalah:

- Menjaga dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana;
- Melihat urgensi dalam pelaksanaan program prioritas;
- Meningkatkan upaya mitigasi risiko dalam pencapaian target program/kegiatan.



7. Evaluasi Internal

Selama tahun 2022, Pusbindiklatren menyelenggarakan rapat internal di lingkungan Pusbindiklatren sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi atas ketercapaian kinerja program dan kegiatan Pusbindiklatren. Rapat internal dapat dilakukan di masing-masing kelompok kerja maupun forum untuk pegawai Pusbindiklatren secara keseluruhan. Di samping itu, Pusbindiklatren juga melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas seperti biro umum, inspektorat bidang administrasi dan umum, inspektorat bidang kinerja kelembagaan, biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana.

Selain melibatkan pihak internal Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren juga melibatkan pihak eksternal untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja. Pihak eksternal tersebut diantaranya dari mitra kerja sama Pusbindiklatren, peserta dan alumni program beasiswa pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren, serta instansi auditor eksternal. Contoh forum kegiatan evaluasi yang dilakukan antara lain

- a. Forum evaluasi dan perencanaan kegiatan awal tahun berjalan;
- b. Pemantauan progres penyerapan dan realisasi kegiatan Pusbindiklatren;
- c. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren;
- d. Rapat koordinasi pegawai Pusbindiklatren tahun 2022 (evaluasi program dan kegiatan Pusbindiklatren pada akhir tahun);
- e. Rapat koordinasi administrasi keuangan dengan mitra universitas;
- f. Rapat PHLN dan *unit cost* magang;
- g. Rapat *stakeholder*;
- h. Rapat koordinasi langkah strategis administrasi keuangan akhir tahun 2022;;
- i. *Sharing session* dengan *stakeholder* terkait pencairan anggaran dan forum kerja tim anggaran Pusbindiklatren tahun 2022.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian IKU Pusbindiklatren, keenam IKU Pusbindiklatren telah memenuhi target capaian. Pencapaian IKU (1) persentase Perencana yang lulus uji kompetensi sebesar 89,59% dengan target 70%; (2) persentase karyasiswa yang lulus pendidikan adalah 84,66% dengan target 75%; (3) persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan sebesar 99,91% dengan target 92%; (4) persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan sebesar 100% dengan target 85-89,9%; (4) tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 94,42 dengan target nilai 80; dan (6) tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebesar 93,65 dengan target nilai 90. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp64.837.013.689 atau 87,37 persen dari total anggaran sebesar Rp74.210.726.000. Berdasarkan analisis efisiensi anggaran, dengan melihat ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi efisiensi di Pusbindiklatren.

B. Rekomendasi 2022 untuk Rencana Aksi 2023

Secara umum rekomendasi tahun 2022 akan diupayakan diimplementasikan pada tahun 2022 sebagai berikut.

1. Pokja 0 (Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan)

- a. Pembaharuan secara menyeluruh mengenai informasi dan tampilan yang berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jabatan fungsional perencana pada laman *website* Pusbindiklatren.
- b. Pengembangan visualisasi hasil tabulasi kuesioner, *create* sertifikat bagi pengajar, pengelompokkan sistem penilaian pada aplikasi Sintesa.
- c. Evaluasi Majalah Simpul Perencana dan penyesuaian jumlah terbitan dalam satu tahun.



- d. Penyelenggaraan program yang berkaitan dengan diseminasi hasil *knowledge management*, seperti: *workshop* penulisan karya tulis ilmiah, *sharing session* dan temu alumni, dan *ministerial lecture*.
- d. Pembaharuan format pelaksanaan kegiatan Obrolan Djoemat Pagi, Buka Warung IDW, dan Klinik Perencana .
- e. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f. Pembaharuan Standar Pelayanan, terutama SOP Pelayanan Tamu Luring.

2. Pokja 1 (Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan)

- a. Pelaksanaan *On The Job Training* yang meliputi:
 - Penyusunan naskah kerja sama dengan para institusi mitra;
 - Mengevaluasi pelaksanaan *pilot project* OJT agar diperoleh rekomendasi perbaikan di masa mendatang.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan *pilot project* pelatihan bauran (*hybrid*) untuk perbaikan di masa mendatang.
- c. Melanjutkan fasilitasi HCDP kepada K/L/D dan melakukan harmonisasi serta koordinasi fasilitasi HCDP dengan LAN.
- d. Dengan adanya transisi struktur pendanaan diklat di Pusbindiklatren, maka diperlukan inovasi-inovasi pembiayaan diklat yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu Pusbindiklatren perlu mengidentifikasi potensi dan mengembangkan skema-skema pembiayaan *co-funding* yang bisa dikerjasamakan dengan mitra K/L/D maupun mitra pembangunan lainnya.

3. Pokja 2 (Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan)

- a. Implementasi *pilot project* OJT khususnya bagi ASN daerah ke instansi di pusat atau daerah lain yang menjadi percontohan.
- b. Implementasi *pilot project* pelatihan bauran sebagai tindak lanjut dari masukan peserta pelatihan tahun sebelumnya dan juga sebagai implikasi dicabutnya PPKM oleh pemerintah.
- c. Implementasi seleksi wawancara untuk seluruh calon penerima beasiswa pendidikan untuk memastikan diperolehnya calon karyawan yang memenuhi persyaratan.

4. Pokja 3 (Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana)

- a. Melanjutkan rencana kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi JFP bagi para calon peserta uji kompetensi.



- b. Melanjutkan penyusunan peraturan turunan sebagai amanah dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020.
- c. Melaksanakan Seminar Nasional JFP dalam rangka mengetahui dan menampung aspirasi dari para Instansi Pengguna JFP dan bagi para Perencana terkait dengan implementasi peraturan-peraturan baru dan juga pasca program penyetaraan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mengambil sampel instansi dengan jumlah pejabat fungsional perencana hasil penyetaraan terbanyak dan/atau instansi dengan jumlah lulusan uji kompetensi terbanyak.
- e. Penyelenggaraan uji kompetensi yang semula berbasis daring/*online* menjadi luring/*offline*.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusbindiklatren Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wignyo Adiyoso
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Pembangunan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taufik Hanafi
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Taufik Hanafi

Jakarta, November 2022
Pihak Pertama

Wignyo Adiyoso



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA PEMBANGUNAN**

Sasaran Program:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Sasaran Strategis/Program 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		
	Indikator SS 1.1: Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi		
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	1. Persentase Jabatan Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi	70%
		2. Persentase karyawan yang lulus pendidikan	75%
		3. Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	92%
II.	Sasaran Strategis/Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner		
	Indikator SS 3.2: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan		
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Percentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi / Unit Kerja Perencanaan Pembangunan	85-89,9%
III.	Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
1	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80
IV.	Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan		



NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Indeks kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	90

Kegiatan:

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Anggaran:

Rp 74,174,583,000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Taufik Hanafi

Jakarta, November 2022
Pimpinan Unit Kerja

Wignyo Adiyoso

Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren Tahun 2022

RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA TAHUN 2022																	
IKUES II	NO	KEGIATAN	WAKTUBULAN PELAKSANAAN												ALOKASI SDM	KETERANGAN	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator
1. Persentase Perencana yang lulus uji kompetensi 2. Persentase karyawan yang lulus pendidikan 3. Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	A	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan													Teresna Murti, SH, MPM	staf pusbindiklatren dan PIC Kurikulum	
	1	SES.P22.11.P011.11.1 Kajian dan Evaluasi Kebijakan Pusbindiklatren															
	2	SES.P22.11.P011.2 Pengembang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan													Wigno Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.	staf pusbindiklatren	
4. Persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi unit kerja perencanaan pembangunan	B	Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan													Dwi Harini Septaning Tivas, SE, MA	staf pusbindiklatren	
	1	SES.P22.11.P012.1 Pelaksanaan Pendidikan													Wiky Wilani, S.Sos, MA	staf pusbindiklatren	
	2	SES.P22.11.P012.2 Pelaksanaan Pelatihan													Ali Muharam, SIP, MSE, MA	staf pusbindiklatren	
5. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	C	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional													Feia Puspa Murti, SE, MAP	staf pusbindiklatren	
	1	SES.P22.11.P013.1 Pengembangan Kebijakan dan Penyusunan Regulasi													M. Iksan Maolana, SH, LL.M	staf pusbindiklatren	
	2	SES.P22.11.P013.2 Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional													Rita Miranda, S.Sos, MPA	staf pusbindiklatren	
6. Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	D	Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan															
	1	SES.P22.11.P010.1 Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemantauan Anggaran													Pandu Pradhana, ST, MPA	staf pusbindiklatren	
	2	SES.P22.11.P010.2 Pengelolaan Administrasi Pusat													Dra. Maslakah Murni, M.P	staf pusbindiklatren	
	3	SES.P22.11.P010.3 Pengelolaan Humas, Teknologi dan Informasi													Karyoto, S.Sos	staf pusbindiklatren	
	4	SES.P22.11.P010.4 Pengelolaan Kegiatan Khusus												Eko Slamet Suratman, SH, M.Si	staf pusbindiklatren		

didukung anggaran sebesar Rp74.210.726.000



Lampiran 3. Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Pelatihan Fungsional Perencana

A. Uji Kompetensi Gelombang I

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	23—24 April 2022	116
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		256
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		117
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG I				289

B. Uji Kompetensi Gelombang II

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	25—26 Juni 2022	64
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		187
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		41
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG II				292

C. Uji Kompetensi Gelombang III

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	20, 21, 27, dan 28 Agustus 2022	142
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		441
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		92
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG III				675



D. Uji Kompetensi Gelombang IV

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	1—2 Oktober 2022	89
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		368
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		89
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG IV				253

E. Uji Kompetensi Gelombang V

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	17—18 Desember 2022	68
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		368
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		89
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG V				525

F. Uji Kompetensi Ahli Utama

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Utama	Pusbindiklatren	April—Juli 2022	11
2.	FP Muda	Pusbindiklatren	Juli—Oktober 2022	9
JUMLAH PESERTA UKOM JFP AHLI UTAMA				20



G. Pelatihan Fungsional Perencana Pusbindiklatren Bappenas 2022

No.	Jenjang	Prodi/Center	Periode	Peserta
1	PFP Ahli Pertama	MPWK SAPPK ITB	8 Agustus—23 September 2022	24
2	PFP Ahli Pertama	RCCP FIA UB	15 Agustus—30 September 2022	23
3	PFP Ahli Pertama	MAP UGM	8 Agustus—23 September 2022	24
4	PFP Ahli Pertama	LPEM FEB UI	15 Agustus—30 September 2022	22
5	PFP Ahli Pertama	P2KP UNHAS	8 Agustus—23 September 2022	23
6	PFP Ahli Pertama	MET FEB UNPAD	15 Agustus—30 September 2022	24
7	PFP Ahli Pertama	PPS UNSRI	15 Agustus—30 September 2022	24
8	PFP Ahli Pertama	FEB USK	8 Agustus—23 September 2022	23
9	PFP Ahli Pertama	Kementerian Agama (Pelatihan Mandiri)	4 Oktober 2021—19 November 2021	25
10	PFP Ahli Pertama	Kementerian Agama (Pelatihan Mandiri)	25 Oktober 2021—10 Desember 2021	25
Jumlah Peserta Pelatihan Perencana Ahli Pertama				237



Lampiran 4. Jumlah Total Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2022

Tahun Penempatan (angkatan)	Program	Jumlah
2016	S-3 Dalam Negeri	2
2017	S-2 Dalam Negeri	2
	S-3 Dalam Negeri	3
2018	S-2 Dalam Negeri	10
	S-2 Dalam Negeri Afirmasi	1
	S-3 Luar Negeri	2
2019	S-2 Dalam Negeri	26
	S-2 Dalam Negeri Afirmasi	3
	S-2 Linkage PHRD IV	45
	S-2 Linkage Premium	20
	S-2 Luar Negeri COREMAP-CTI	4
	S-3 Dalam Negeri	1
2020	S-2 Dalam Negeri	189
	S-2 Dalam Negeri Afirmasi	37
	S-2 Dalam Negeri <i>Smart City</i>	14
	S-2 Linkage Premium	15
	S-2 Linkage SSMP	2
	S-2 Linkage PHRD IV	14
	S-2 Luar Negeri COREMAP-CTI	5
2021	S-2 Dalam Negeri	3
	S-2 Dalam Negeri <i>Smart City</i>	1
TOTAL		399



Lampiran 5. Jumlah Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022

Program	Lulus	Total	Selisih	Persentase
Afirmasi UB	8	14	6	57,14%
Afirmasi UGM	15	15	0	100,00%
Afirmasi Unsri	14	14	0	100,00%
MAP UB	8	10	2	80,00%
MAP UGM	9	10	1	90,00%
MAP Unsri	9	9	0	100,00%
ME Unand	6	8	2	75,00%
MEKK UI	11	10	0	100,00%
MEP UGM	10	10	0	100,00%
MET Unpad	12	12	0	100,00%
MIE UB	10	10	0	100,00%
MIE Unsyiah	7	8	1	87,50%
MIL Geo UGM	9	9	0	100,00%
MIL Undip	9	10	1	90,00%
MIL Unpad	9	9	0	100,00%
MKIK UGM	7	10	3	70,00%
MPD IPB	8	10	2	80,00%
MPKP UI	9	10	2	81,82%
MPWK ITB	6	6	0	100,00%
MPWK UGM	9	10	1	90,00%
MPWK Undip	7	8	1	87,50%
MSP ITB	6	9	3	66,67%
MSTT UGM	3	3	0	100,00%
PPIE UI	9	10	1	90,00%



Program	Lulus	Total	Selisih	Persentase
PPW Unhas	8	9	1	88,89%
PSLP UB	1	2	1	50,00%
PWL IPB	4	10	6	40,00%
Tematik ITB	3	7	4	42,86%
Tematik UGM	6	6	0	100,00%
Tematik Undip	5	5	0	100,00%
Trans ITB	3	4	1	75,00%
SSMP MTP	2	5	3	40,00%
SSMP MTS	0	2	2	0,00%
Premium Unpad	0	3	3	0,00%
Premium PWK UGM	3	3	0	100,00%
Premium Undip	2	3	1	66,67%
Premium UI	7	7	0	100,00%
Premium Sosio UGM	3	4	1	75,00%
COREMAP	5	5	0	100,00%
Jepang ITB	6	6	0	100,00%
Jepang UGM	7	8	1	87,50%
Jepang Undip	1	3	2	33,33%
TOTAL	276	326	50	84,66%



Lampiran 6. Realisasi Program Pelatihan

A. Pelatihan Swakelola Tipe II *Batch 1*

No	Pelatihan	Prodi	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi
1	Monitoring & Evaluasi	LP3E Unpad	25 Juli—5 Agustus 2022	25
2	Perencanaan Perumahan dan Perkotaan	MPWK UGM	15—26 Agustus 2022	26
3	Perencanaan Lingkungan	MIL Undip	25 Juli—5 Agustus 2022	25
4	Kelayakan Proyek	LEMTEK UI	1—12 Agustus 2022	25
5	Perencanaan dan Penganggaran	MEP UGM	1—12 Agustus 2022	25
		FE Unand	25 Juli—5 Agustus 2022	25
6	Perencanaan Penanggulangan Bencana	PPS Unsyiah	1—12 Agustus 2022	25
7	KPBU	MPWK UNDIP	8—19 Agustus 2022	25
8	PPD RPDP/K	FE UTM	25 Juli—5 Agustus 2022	25
TOTAL				226

B. Pelatihan Swakelola Tipe II *Batch 2*

No	Pelatihan	Prodi	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi
1	Monitoring & Evaluasi	MPWK UGM	10—21 Oktober	24
		RCCP UB	10—21 Oktober	25
2	Perencanaan Lingkungan	MIL UNPAD	17—28 Oktober	25
3	Kelayakan Proyek	LPEM UI	10—21 Oktober	25
4	Perencanaan dan Penganggaran	FEB UNSYIAH	17—28 Oktober	25
5		MPWK ITB	17—28 Oktober	25
6	Perencanaan Penanggulangan Bencana	UNTAD	17—28 Oktober	25
8	PPD RPDP/K	MAP UGM	17—28 Oktober	25
		PPS UNSRI	24 Oktober—4 November	24
		UNIPA	14—25 November	25
		UNCEN	14—25 November	23
9	PEL/D	MPWK UNDIP	24 Oktober—4 November	24
TOTAL				295



C. Pelatihan Lainnya

No	Pelatihan	Prodi	Tanggal Pelatihan	Realiasi
1	Monev	Kementerian Pariwisata	2–4 Februari 2022	28
2	EDP 2	NTU	21 Maret–1 April 2022	26
3	JFP Pertama Kemenag 1	RCCP UB	14 Maret–28 April 2022	25
	JFP Pertama Kemenag 2	RCCP UB		25
4	Economic Valuation of Marine	USA	18–30 Mei 2022	15
5	NG MANAGEMENT OF SUSTAINABLE FISHERIES	Island	18–30 Mei 2022	15
6	Perencanaan Penganggaran Batch 1	Kominfo	13–16 Juni 2022	28
7	Perencanaan Penganggaran Batch 2	Kominfo	4–7 Juli 2022	30
8	Perencanaan Penganggaran Batch	Prov Jatim	14–18 November 2022	36
9	Monev	Kominfo	21–23 Juni 2022	23

D. Jumlah Peserta Seleksi Program Pelatihan

NO	PROGRAM	PELAMAR	VERIFIKASI	PENEMPATAN
1	PPD	229	130	24
2	MONEV	745	447	74
3	Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah	111	48	24
4	KPBU	97	56	25
6	PPD PPDRPDP/K	159	130	122
7	Mitigasi Bencana	149	81	50
8	Kelayakan Proyek	148	74	50
9	<i>Planning and Budgeting</i>	537	292	100
10	Perencanaan Lingkungan	174	105	50
11	Perencanaan Perumahan Dan Perkotaan	53	30	26



NO	PROGRAM	PELAMAR	VERIFIKASI	PENEMPATAN
13	Renstra	635	492	78
12	<i>International Conference</i>	41	18	10
5	Magang Luar Negeri	44	21	11
14	BEAP	333	161	25
15	JFP Pertama	690	328	187
16	Transformasi Ekonomi	25	25	20
17	<i>The Evidence Based Policy Making</i>	25	25	25
JUMLAH		4195	2463	901

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon: (021) 319 28280, 319 28285, 319 28279
Faksimile: (021) 319 28281
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs Web: pusbindiklatren.bappenas.go.id

  Pusbindiklatren Bappenas   @pusbindiklatren